



**News Title :** Bappebti Nantikan Tanggapan Kemenkeu Soal Penurunan Tarif Pajak kripto

**Media Name :** katadata.co.id

**Journalist :** Lona Olavia

**Publish Date :** 20 March 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 0

**Resources :** Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Bappebti), Aditya Wirawan (Interim Country Manager Luno Indonesia)

**Ads Value :** 0

**Section/Rubrication :** Finansial

**Topic :** Pajak Kripto

**Katadata.co.id** Cari

Berita Finansial Digital Eksporpeda Ekonomi Hijau Jurnalisme Data In-Depth & Opini Otomotif Video Po

**FINANSIAL** Makro Keuangan Bursa Korporasi

Finansial > Bursa

**Bappebti Nantikan Tanggapan Kemenkeu Soal Penurunan Tarif Pajak kripto**

Oleh Lona Olavia  
20 Maret 2024, 12:06

Ilustrasi mata uang crypto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah mengevaluasi besaran pajak kripto yang dianggap terlalu tinggi.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, Bappebti mengusulkan nilai pajak dipotong setengah dari nilai **pajak kripto** yang berlaku saat ini, yaitu sekitar 0,05% hingga 0,055%.

Advertisement

"Sesuai aspirasi para pedagang usuhnya dievaluasi, dikurangi setengah dari yang *existing* dulu supaya kembali berdaya sating dan meningkatkan kembali transaksi **kripto** di dalam negeri," ujarnya kepada *Katadata.co.id*, Rabu (20/3).

Atas hal itu, Tirta mengaku sudah sering bertemu dengan Asosiasi Pedagang Aset Kripto. Namun ketika ditanya kapan tarif pajak yang baru itu bisa berlaku, ia mengatakan hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Bappebti saat ini pun masih menunggu tanggapan dari DJP soal usulan tarif pajak kripto. "Tidak ada tanggapan, baru yang disampaikan DJP ke media saja," katanya.

**BACA JUGA**

- Nilai Transaksi Kripto di Bulan Februari Melonjak 113% Capai Rp 33,7 T
- Ini Pentingnya Analisis Sentimen Pasar dalam Strategi Investasi Kripto
- Bappebti akan Uruskan Penurunan Pajak Kripto ke Dijen Pajak

Sementara DJP hingga Februari 2024 mencatat penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 539,7 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 72,44 miliar penerimaan 2024.

Advertisement

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 254,53 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di *exchanger* dan Rp 285,19 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di *exchanger*," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangan resminya.

Sementara para pedagang aset kripto menyambut baik kajian ulang besaran pajak kripto di Indonesia yang dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi investor dan masyarakat saat berinvestasi aset kripto.

**Halaman Selanjutnya**  
"Dengan adanya rencana penghapusan ulang perpajakan..."

Halaman 1 2

"Dengan adanya rencana pengkajian ulang perpajakan kami berharap akan menjadi alasan kuat investor untuk bertahan dan bertransaksi di exchange lokal yang terdaftar resmi oleh Bappebti," kata Interim Country Manager Luno Indonesia Aditya Wirawan kepada *Katadata.co.id*, Rabu (20/3).

Melalui Asosiasi Pedagang Aset Kripto dan Blockchain Indonesia (Aspakrindo - ABI), Luno Indonesia aktif menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan regulator terkait besaran tarif pajak yang ideal.



Apalagi di banyak negara, seperti Malaysia dan sejumlah negara di Eropa, tidak memungut PPN atas transaksi aset kripto. Dengan adanya kajian ulang mengenai besaran pajak kripto di Indonesia, akan membantu dan menjaga daya saing Investasi exchange resmi terdaftar di Bappebti dan mencegah investor Tanah Air beralih ke exchange yang tidak resmi terdaftar di Bappebti.

"Perlu dipahami bahwa industri aset kripto ini relatif baru, namun terus berkembang pesat. Kami melihat, tren Investasi aset kripto di Indonesia sangat positif dan disambut baik oleh masyarakat di Indonesia," ujar Aditya.

Realisasi Penerimaan Pajak Digital Indonesia Berdasarkan Sumber (Februari 2024)



Lihat sumber >

databoks

Advertisement

#### BACA JUGA

Nilai Transaksi Kripto di Bulan Februari Melonjak 113% Capai Rp 33,7 T

Ini Pentingnya Analisis Sentimen Pasar dalam Strategi Investasi Kripto

Bappebti akan Usulkan Penurunan Pajak Kripto ke Ditjen Pajak

Meskipun demikian, tidak dipungkiri bahwa aset kripto merupakan sebuah aset yang mendunia, yang bisa diakses secara global. Maka dari itu perlu penting peran regulator dalam mendukung industri aset kripto dalam negeri sehingga tercipta industri nasional yang memiliki daya saing kuat.

"Kami optimis aset kripto akan bisa terus berkembang menjadi investasi masa depan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, semua pemain industri dan regulator di Indonesia, termasuk Luno, terus berupaya menciptakan industri dan ekosistem kripto yang sehat dan teregulasi di Indonesia," katanya.

Halaman: [1](#) [2](#)

[#Kripto](#) [#Pajak Kripto](#) [#Aset Kripto](#) [#Pajak](#) [#Update Me](#)